BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Boyolali Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perhubungan menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Boyolali ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga

berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga

diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Boyolali.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RKPD, bahwa Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;

o. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Boyolali dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pemberian perijinan, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang perhubungan.

Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Boyolali Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

B Landasan Hukum

C Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali

D Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN LALU

A Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan, Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

B Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

C Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

B Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

C Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOYOLALI

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-4) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD Berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Kabupaten Boyolali Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada

dibawah ini beserta penjelasan terhadap pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini:

Tabel II.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021

No	Sarana	Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 (awal Periode RPJMD)		**Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)**		**Target Kinerja RKPD Kabupaten / kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi**		Realisasi Capaian Kinerja TW IV RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja RPJMD Kabupaten / kota s/d Tahun 2021 (TW III Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/ kota s/d TW III Tahun 2021 (%)	
1	2	3								4	5		6		7		8		9		10		11	
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih,berwibawa,konstitusional, efektif dan demokratis	**2**	**09**	**2**	**9**	**1**	**1**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi**	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran													
		2	9	2	9	1	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya perangko dan terpenuhinya pengiriman surat	Bulan	60	11.975.500	48	1200000	12	1500000	12	900.000	48	2.184.000	20	7.51

		2	9	2	9	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	Bulan	60	91.354.650.000	24	203665284 64	12	210144000 00	36	18.731.828.455	60	55.409.688.540	20	22.06
		2	9	2	9	1	1	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	60	191.220.000	24	65935000	12	15000000	36	14.065.000	60	6572650	20	16.09

		2	9	2	9	1	1	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Bulan	60	535.427.250	24	144426300	12	135000000	36	82.690.215	60	255.873.375	20	20.10
		2	9	2	9	1	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya fungsi layanan administrasi perkantoran	Bulan	60			389000		1.500.000		286.100		340.000		
		2	9	2	9	1	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Bulan	60	354.393.200	24	18995815	12	23979000	36	23.800.711	60	64.717.420	20	7.04

		2	9	2	9	1	1	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	1.055.733.000	24	91353215	12	79610000	36	33.438.460	60	204.353220	20	8.01
		2	9	2	9	1	1	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/telepon	Terpenuhinya kubutuhan komponen instalasi listrik/telepon	Bulan	60	72.177.500	24	2790400	12	4000000	36	453.550	60	9.296.000	20	37.24
		2	9	2	9	1	1	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	277	2.023.998.000	165	320964600	35	300000000	34	120.367.232	199	119.011.375	20	11.91
		2	9	2	9	1	1	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya buku peraturan perundang-undangan	Bulan	60	24.000.000	24	42875000	12	1800000	36	0	60	5.250	20	12.5

		2	9	2	9	1	1	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM, dan minyak pelumas kendaraan	Bulan	60	1.118.878.500	24	204327010	12	240000000	36	158.334.621	60	322.752440	20	16.9
		2	9	2	9	1	1	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan minum kantor	Bulan	60	1.060.900.000	24	96720000	12	87550000	36	20.775.000	60	220.000.000	20	10.59
		2	9	2	9	1	1	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terpenuhinya pelaksanaan tugas dalam dan luar daerah	Bulan	60	946.682.500	24	274061899	12	313650000	36	86.488.813	60	602.380.868	20	28.32
		2	9	2	9	1	1	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)	Terpenuhinya jasa pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	60	393.975.000	24	133491930	12	150000000	36	1.322.086.877	60	2.395.907.278	20	14

		2	**9**	**2**	**9**	**1**	**1**	**6**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Tercapainya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akuntabel										36	-		
		2	9	2	9	1	1	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD yang akuntabel	Laporan	60	63.000.000	24	890000	2	995000	36	0	60	890.900.000	3,33	0,46
		2	**9**	**2**	**9**	**1**	**1**	**15**		**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**											36			
		2	9	2	9	1	1	15	2	Penyusunan kebijakan, norma, standar, dan prosedur bidang perhubungan					24	143991100		250000000	36	138.162.000	60	241.537.800		

		2	9	2	9	1	1	15	4	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan					24	19250000		21500000	36	0	36	0		
		2	**9**	**2**	**9**	**1**	**1**	**16**		**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	**Tepeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor dan terpeliharanya terminal angkutan darat**										36			
3	Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha dan investasi	2	9	2	9	1	1	16	1	Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	- Terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor	buah	60	845.075.000	24	11000000	12	103000000	36	10.000.000	60	315.345.000	20	11.36
		2	9	2	9	1	1	16	4	Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Terpeliharanya terminal penumpang	Terminal	5	854.296.000	24	63070000	2	75000000	36	0	60	628.387.000	40	13
										Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Terpenuhinya sarana perhubungan			0		0		0		0		0		

		2	**9**	**2**	**9**	**1**	**1**	**17**		**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**	**Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten**									36			
		2	9	2	9	1	1	17	5	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya	Pengawasan dan pembinaan terhadap laik kendaraan wajib uji	bulan	60	1.680.935.000	24	37002500	12	4282000	36	0	60	508.930.070	20	1.64
		2	9	2	9	1	1	17	14	Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Terwujudnya sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Kegiatan	12	163.928.000	24	10607550	2	0	2	0	36	30.558.100	16’66	7.8
		2	9	2	9	1	1	17	15	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan	Terwujudnya Pemilihan Supir Teladan Tingkat Kabupaten	orang	18	90.594.000	24	16338250	3	9000000	3	0	27	39.943.750	16,66	16.57

									umum teladan														
		2	9	2	9	1	1	17	3	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Terpenuhinya kegiatan temu wicara pengelola ankutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Orang	250	55.000.000	24	3476500	50	450000	40	450000	62	11.242.750	16	8,54
		2	9	2	9	1	1	17	8	Kegiatan Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Terpenuhinya kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Lokasi	63	109.000.000	24	9896150	8	315000000	8	0	36	29.150.700	12,69	8,16
		2	9	2	9	1	1	17	18	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ	Terwujudnya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Tingkat	Orang	15	129.772.000	24	17987250	3	10100000	3	0	36	54.122.750	20	13.39

										Kabupaten														
		2	**9**	**2**	**9**	**1**	**1**	**18**		**Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan**											36			
		2	9	2	9	1	1	18	4	Penataan lingkungan sarana perhubungan					24	296949400		425000000		413.913.500	36	11.381.770.500		
		2	**9**	**2**	**9**	**1**	**1**	**19**		**Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**	**Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka ,guardrill)**											-		
		2	9	2	9	1	1	19	1	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Terciptanya Prasarana Perhubungan	%	500	12.876.319.000	24	846678924	100	847876000	100	817.560.600	124	3.938.748.674	20	10.30
		2	9	2	9	1	1	19	2	Pengadaan Marka Jalan	Terpasangnya Marka Jalan	paket	5	2.385.231.700	24	198691310	1	200.000.000	1	185.179.500	36	826.458.200	20	13.24

		2	9	2	9	1	1	19	3	Pengadaan pagar pengaman jalan	Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan	%	500	3.312.191.000	24	291464350	100	624017000	100	480.235.750	124	1.666.123.250	20	4,47
		2	9	2	9	1	1	19	2	Inspeksi keselamtan lalu lintas Dishub Kab Boyolali		paket	5	2.385.231.700	24	14651500	1	0	1	0	25	492.935.600	20	1.37
										Peningkatan kapasitas keselamatan berlalu lintas Dishub Kab Boyolali					24	0		0		0	36			
		2	**9**	**2**	**9**	**1**	**1**	**20**		**Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**	**Rasio Kendaraan Umum Laik Jalan**										36	-		
		2	9	2	9	1	1	20	2	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali	%	500	3.817.000.000	24	245022180	100	4850000000	100	4.291.500.000	124	1.009.079.877	20	9.13

		2	9	2	9	1	1	20	5	Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor					24	29769000		2750002000		2.688.552.200	36	24.745.000		
		2	9	2	9	1	1	20	6	Penyediaan sistem informasi pelayanan database kendaraan					24	39182000		185600000		64.350.000	36			
		4	**3**	**2**	**9**	**1**	**1**	**21**		**Program perencanaan pembangunan daerah**														
		4	3	2	9	1	1	21	16	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD					24	1000000		995000		0	36	1.900.000		
		1	**3**	**2**	**9**	**1**	**1**	**34**		**Program pembangunan pengelolaan penerangan jalan umum**														
		1	3	2	9	1	1	34	1	Pembangunan penerangan jalan umum					24	5320502480		5.000.000.0000		4.582.062.450	36	17.116.175.685		
		1	3	2	9	1	1	34	2	Pemeliharaan/rehabilitasi penerangan					24	565689860		500000000		481.722.769	36	479.107.260		

										jalan umum														

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing indikator yang telah ditetapkan

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Pencapaian Target Tahun 2022

Pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali menerima anggaran sebesar Rp. 35.471.473.000,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 34.749.196.121,- atau mencapai 97.96 %, dengan tingkat capaian 99 % dari total alokasi anggaran uraian selengkapnya atas capaian tercebut dapat dilihat pada tabel 2.1 diatas.

Faktor-faktor penyebab tercapainya, target kinerja:

1. Anggaran pembiayaan kegiatan yang mencukupi untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten yang dapat mendukung program dan kegiatan yang direncanakan.

C. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 maupun perkiraan capaian tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

1. Besarnya keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Boyolali tidak diiringi dengan peningkatan pembiayaan, sehingga pencapaian pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Boyolali perlu dilakukan bertahap dengan pembagian yang proporsional diantara SKPD;

2. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami beberapa hambatan/kendala;
3. Sebagian besar usulan program/kegiatan yang diinventarisasi tidak sesuai dengan Rencana program/kegiatan yang telah dicanangkan pada RENJA maupun RENSTRA SKPD;
4. Perencanaan program/kegiatan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali masih berorientasi terhadap output bukan outcome, sehingga pelaksanaan evaluasi tidak optimal. Hal ini berdampak pada keterlambatan akan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan secara keseluruhan;
5. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali tidak didukung dengan sistem kerja stakeholder pendukung, sehingga tidak sedikit pekerjaan yang dapat diselesaikan melebihi target waktu yang ditentukan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026, maka pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme perencana serta pelaksanaan pembangunan dengan arah kebijakan :
   - Pelibatan stakeholder dalam proses perencana dan kebijakan politik;
   - Melakukan sistem jaring asmara melalui temu karya pembangunan di Kelurahan, Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa tengah, Musrenbang Tingkat Nasional dan Pusat;
   - Meningkatkan peran dokumen RENJA SKPD dalam perumusan pembiayaan pembangunan

2. Meningkatkan konsultasi dan konfirmasi program pembangunan secara terpadu, dengan arah kebijakan
3. Menciptakan sistim jaringan perencanaan kota yang sistimatis, dengan arah kebijakan
   - Menciptakan sistem jaringan perencanaan yang terintegrasi antar SKPD dalam upaya *controling* terhadap kinerja SKPD yang dikaitkan dengan program prioritas RPJMD dan RKPD
4. Menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam sistim perencanaan dan pengkajian potensi ekonomi, dengan arah kebijakan:
   - Melibatkan pihak swasta serta akademisi untuk menjamin tercapainya objektifitas dan netralitas dalam penilaian pelaksanaan pembangunan

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

A. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

1.Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali merupakan unsur teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

2.Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali sesuai Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018, terdiri dari:

1. Kepala.
2. Sekretariat terdiri dari :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
   a. Seksi Lalu Lintas;
   b. Seksi Angkutan
4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari :

a. Seksi Keselamatan

b. Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan Pelanggaran

5. Bidang Pengujian dan Rekayasa Kendaraan terdiri dari:

a. Seksi Pengujian Kendaraan

b.Seksi Rekayasa Kendaraan dan Perbengkelan

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. UPT

1.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Secara umum permasalahan transportasi di Kabupaten Boyolali tidak banyak berbeda dengan daerah lain. Permasalahan transportasi pada umumnya menyangkut infrastruktur, aksesibilitas, issu lingkungan, keselamatan, pelayanan angkutan umum, efisiensi dan efektivitas, dan kesenjangan pelayanan serta prasarana antar wilayah. Secara rinci permasalahan-permasalahan di bidang transportasi adalah sebagai berikut:

1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a) Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih belum memadai terutama dalam penyediaan dan perlengkapan jalan, sehingga masih sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda;

b) Semakin berkembangnya teknologi rekayasa kendaraan bermotor mengakibatkan kecepatan semakin tinggi sehingga membutuhkan ruang untuk berlalu lintas semakin besar pula;

c) Jaringan sarana tranportasi jalan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan angkutan penumpang dan barang, artinya keterjangkauan penumpang, barang sampai daerah terpencil belum terhubungi secara maksimal;

d) Pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan panjang jalan yang dibangun sehingga banyak ruas jalan yang padat dan macet;

e) Tingkat keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi jalan dengan moda lain (antar moda) relatif rendah, sehingga pelayanan dari pintu ke pintu (door to door service) belum dapat terwujud sebagaimana mestinya;

f) Jaringan pelayanan transportasi jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan penumpang dan barang;

g) Semakin terbatasnya ketersediaan energi dan aspek lingkungan;

h) Kurang dan Rusaknya kondisi Perlengkapan Jalan dan LPJU;

i) Konversi BBM menjadi BBG belum berjalan;

j) Belum adanya kebijakan pembatasan kendaraan pribadi;

k) Masyarakat lebih tertarik naik kendaraan pribadi daripada kendaraan umum;

l) Meningkatnya volume kendaraan setiap tahunnya;

m) Banyaknya kendaraan yang menggunakan BBM yang kurang ramah lingkungan;

n) Pelayanan angkutan umum masih rendah sehingga mengakibatkan kurang diminatinya angkutan umum oleh masyarakat;

o) Jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan sampai saat ini 80% usianya melebihi 10 tahun;

p) Pertumbuhan kendaraan pribadi dan sepeda motor sangat tinggi sehingga berpengaruh terhadap load factor angkutan umum;

q) Persaingan antar moda yang semakin meningkat memerlukan peningkatan pelayanan dan utilitisasi;

r) Tumpang tindihnya jaringaan trayek AKAP, AKDP, Angkutan perkotaan, Angkutan Pedesaan dan angkutan perbatasan;

s) Belum optimalnya jaringan dan perijinan angkutan;

t) Kurang disiplinnya para awak kendaraan umum dan masyarakat pengguna angkutan;

u) Masyarakat lebih berminat menggunakan angkutan multifungsi (orang dan barang).

2. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

a) Masih rendahnya disiplin pengemudi;

b) Angkutan pariwisata digunakan untuk angkutan reguler (antar jemput);

3. Bidang Pengujian dan Rekayasa Kendaraan

a) Sarana dan prasarana penunjang pelayanan sudah memadai.

b) Masih banyak awak-awak angkutan yang tidak memperhatikan kelayakan kendaraan angkutan baik umum dan barang.

c) Masih banyaknya kendaraan angkut baik dalam kota maupun luar kota melebihi kapasitas daya angkut.

D. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional dibidang perhubungan darat dan bidang transportasi jalan serta transportasi danau dan sungai, adalah sebagai berikut :

1. Perhubungan Darat

   Arah kebijakannya adalah mampu mewujudkan keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai dan danau serta penyeberangan, sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah tanah air dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan memperkokoh ketahanan nasional.

2. Bidang Transportasi Jalan

   Pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan-kawasan andalan yang cepat berkembang.

3. Bidang Transportasi Sungai dan Danau

   Diarahkan menjadi alternatif transportasi jalan dengan titik berat angkutan barang dalam jumlah besar (massal) disamping itu juga diharapkan akan menjadi sinergi dengan transportasi jalan yang

menjadi tulang punggung sistem trasnportasi dan akan membuka daerah terisolir

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, serta mengacu pada arah kebijakan Kabupaten Boyolali dibidang perhubungan darat, danau dan penyeberangan, prioritas pembangunan bidang perhubungan yang dilaksanakan tahun 2019 :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang perhubungan melalui pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan
2. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan; dan
3. Peningkatan keselamatan angkutan umum dalam trayek.

E. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Mengacu visi Kabupaten Boyolali 2016-2021 yaitu*:* **" *Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera"*.**

Artinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali bercita-cita melanjutkan peningkatan kemudahan layanan dan perijinan investasi melalui pengembangan sistem one stop service, membuka puast informasi investasi, penataan regulasi yang menjamin investasi dan eksekusi sistem produksinya tidak membahayakan keberlanjutan lingkungan serta humanis, peningkatan sarana prasarana dan aparat pelakasana yang memadai. Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali sebagai penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang profesional diharapkan mampu mendorong terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing dan kesejahteraan daera	Terpenuhinya infrasrtuktur penunjang	Penambahan titik lampu
		Tersedianya sarpras pelayanan angkutan umum
		Terpeliharanya sarpras dan fasilitas

		LLAJ
		Tersusunnya dokumen kajian perhubungan
		Tersedianya sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan
		Tersedianya kelengkapan layanan uji kelaikan kendaraan bermotor

Uraian keterkaitan antara visi misi pembangunan di Kabupaten Boyolali dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 dapat dijelaskan dalam misi kedua RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 yaitu Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan dengan arah kebijakan umum sebagai berikut:

- Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan PPJU
- Meningkatkan pelayanan angkutan melalui penyediaan fasilitas angkutan umum serta penertiban lalu lintas
- Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- Meningkatkan pelayanan perhubungan melalui penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dengan tolak ukur kinerja masing-masing kelompok serta kebutuhan pembiayaannya. Kerangka pendanaan yang disajikan bersifat indikatif yang berarti bahwa anggaran pendanaan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kegiatan dan target yang akan dilaksanakan.

Berdasarakan uraian di atas terhadap program dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada Dinas Perhubungan dalam tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023

DAN PRAKIRAAN MAJU 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOYOLALI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TAHUN 2023						PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
				TARGET	APBD KAB	APBD PROV	APBN	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Indikator	LOKASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				**27,749,431,000**			**27,749,431,000**			**27,749,431,000**

x.xx.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase ketercapaian fungsi layanan adminnistrasi perkantoran perangkat daerah**	**BOYOLALI**	12 bulan	**6,113,103,000**			**6,113,103,000**		12 bulan	**6,113,103,000**
x.xx.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	BOYOLALI	12 bulan	4,576,003,000			4,576,003,000		12 bulan	4,576,003,000
x.xx.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	BOYOLALI	12 bulan	1,537,100,000			1,537,100,000		12 bulan	1,537,100,000
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	BOYOLALI	12							
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	BOYOLALI	12							
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BOYOLALI	18							
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	BOYOLALI	2							
x.xx.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase ketercapaian fungsi layanan adminnistrasi perkantoran**	**BOYOLALI**	**12 bulan**	**388,460,000**			**388,460,000**		**12 bulan**	**388,460,000**

		perangkat daerah									
x.xx.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BOYOLALI	12 bulan	3,000,000			3,000,000		12 bulan	3,000,000
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	BOYOLALI	12 bulan	-			-		12 bulan	-
x.xx.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 12 bulan	BOYOLALI	12 bulan	192,000,000			192,000,000		12 bulan	192,000,000
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	BOYOLALI	12 bulan	30,000,000			30,000,000		12 bulan	30,000,000
x.xx.01.2.06.07	Penyediaan bahan /material	Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan	BOYOLALI	12 bulan	25,000,000			25,000,000		12 bulan	25,000,000
x.xx.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan	BOYOLALI	12 bulan	38,460,000			38,460,000		12 bulan	38,460,000

x.xx.01.2.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung/bangunan kantor	BOYOLALI	12 bulan	75,000,000			75,000,000	Usulan sub kegiatan baru	12 bulan	70,000,000
x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan	BOYOLALI	12 bulan	100,000,000			100,000,000		12 bulan	100,000,000
x.xx.01.2.08	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase ketercapaian fungsi layanan adminnistrasi perkantoran perangkat daerah**	**BOYOLALI**	**12 bulan**	**21,002,800,000**			**21,002,800,000**		**12 bulan**	**21,002,800,000**
x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan	BOYOLALI	130 lembar	1,300,000			1,300,000		130 lembar	1,500,000
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan lisrik selama 12 bulan	BOYOLALI	12 bulan	-			-		12 bulan	-
x.xx.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan jas peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	BOYOLALI	12 bulan	100,135,000			100,135,000		12 bulan	110,000,000

x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan	BOYOLALI	12 bulan	1,500,000			1,500,000		12 bulan	1,500,000
x.xx.01.2.09	**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase ketercapaian fungsi layanan adminnistrasi perkantoran perangkat daerah**	**BOYOLALI**	**12 bulan**	**245,068,000**			**245,068,000**		**12 bulan**	**245,068,000**
x.xx.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BOYOLALI	12 bulan	125,068,000			125,068,000		12 bulan	125,068,000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipelihara	BOYOLALI	1 paket	20,000,000			20,000,000		1 paket	20,000,000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung /bangunan kantor yang dipelihara	BOYOLALI	1 paket	100,000,000			100,000,000		1 paket	100,000,000
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang dipelihara	BOYOLALI	1 paket						1 paket	
X.XX.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	BOYOLALI	25						25	

		daerah yang dibuat									
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	BOYOLALI	2						2	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	BOYOLALI	1						1	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	BOYOLALI	1						1	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	BOYOLALI	1						1	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	BOYOLALI	1						1	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	BOYOLALI	15						15	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	BOYOLALI	4						4	
X.XX.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Jumlah layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		12						12	

X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah target retribusi daerah	BOYOLALI								
X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	BOYOLALI	12						12	
2:00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**										
2:15:02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Tersedianya sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan**	**BOYOLALI**	**81**	**6,230,000,000**			**6,230,000,000**		**82**	**6,230,000,000**
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten/kota**	**Tersedianya dokumen sebagai pengambil kebijakan di bidang perhubungan**	**BOYOLALI**	**3 bukui**	**30,000,000**			**377,440,000**	Usulan kegiatan baru	**3 bukui**	**30,000,000**
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen sebagai pengambil kebijakan di bidang perhubungan	BOYOLALI	3 buku	-			-	Usulan sub kegiatan baru	3 buku	-
2.15.02.2.01.02	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah pelajar yang mengikuti lomba pemilihan pelopor keselamatan LLAJ di Kabupaten	BOYOLALI	20 orang	30,000,000			30,000,000	Usulan sub kegiatan baru	20 orang	30,000,000

		Boyolali									
2.15.02.2.01.02	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi terkait aturan perbengkelan/karoseri		10 orang	-			-		10 orang	-
		Jumlah aplikasi bengkel online yang dikembangkan dan dipelihara		1 paket						1 paket	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten /Kota**	**Jumlah kebutuhan sarana perlengkapan jalan untuk keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas yang tersedi**	**BOYOLALI**	**8016 tiitk/meter/paket**	**5,905,000,000**			**5905000000**		**8016 tiitk/meter/paket**	**5,905,000,000**
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten /Kota	Jumlah titik lampu penerangan jalan umum yang dipasang	BOYOLALI	400 titik	4.000,000,000			4.000,000,000		12 bulan	4.000,000,000
		Jumlah rambu rambu lalu lintas yang dipasang	BOYOLALI	400 titik	500,000,000			500,000,000		400 titik	500,000,000
		Panjang marka jalan yang disediakan	BOYOLALI	7000 meter	280,000,000			280,000,000		7000 meter	280,000,000

		Jumlah pagar pengaman jalan yang dipasang	BOYOLALI	200 meter	300,000,000			300,000,000		200 meter	300,000,000
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah tempat-tempat pemberhentian angkutan umum yang direhabilitasi/ dipelihara	BOYOLALI	10 unit	50,000,000			50,000,000	Usulan sub kegiatan baru	10 unit	50,000,000
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	BOYOLALI	6 paket	775,000,000			775,000,000		6 paket	775,000,000
2.15.02.2.03	**Pengelolaan terminal penumpang tipe C**	**Jumlah terminal yang yang dilengkapi Fasilitas penyelenggraan terminal penumpang tipe C**	**BOYOLALI**	**6 Unit**	**70,000,000**			**70,000,000**	Usulan kegiatan baru	**6 Unit**	**70,000,000**
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal tipe C yang dipelihara	BOYOLALI	3 unit	70,000,000			70,000,000	Usulan sub kegiatan baru	3 unit	70,000,000
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah lokasi parkir yang dikelola atau difasilitasi**	**BOYOLALI**	**136 lokasi**	**30,000,000**			**30,000,000**	Usulan kegiatan baru	**136 lokasi**	**30,000,000**

2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana perparkiran yang tersedia	BOYOLALI	15 buah	30,000,000			30,000,000	Usulan sub kegiatan baru	15 buah	30,000,000
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten /Kota**	**Tersedianya perlangkapan jalan**	**BOYOLALI**	**4 kecamatan**	**195,000,000**			**195,000,000**	Usulan kegiatan baru	**4 kecamatan**	**195,000,000**
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah kegiatan car free Sunday	BOYOLALI	23 kegiatan	-			-	Usulan sub kegiatan baru	23 kegiatan	-
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten/kota	BOYOLALI	1 paket	195,000,000			195,000,000	Usulan sub kegiatan baru	1 paket	195,000,000
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Jumlah penindakan pelanggaran angkutan jalan	BOYOLALI	40 kali	-			-	Usulan sub kegiatan baru	40 kali	-
2.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah rekomendasi andalalin yang ditindaklanjuti**	**BOYOLALI**	**12 dokumen**	**-**			**-**	Usulan kegiatan baru	**12 dokumen**	**-**
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah dokumen andalalin yang tersedia	BOYOLALI	36 dokumen	-			-	Usulan sub kegiatan baru	36 dokumen	-

2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah lokasi pelaksanaan andalalin yang diawasi	BOYOLALI	12 lokasi	-			-	Usulan sub kegiatan baru	12 lokasi	-
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jalur trayek angkutan umum yang tersedia di Kabupaten Boyolali**	**BOYOLALI**	**12 buah**	**218,000,000**			**218,000,000**	Usulan kegiatan baru	**12 buah**	**218,000,000**
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola angkutan umum yang mengikuti temu wicara untuk menciptakan pelayanan angkutan di Kabupaten Boyolali yang aman ,nyaman untuk keselamatan penumpang	BOYOLALI	25orang	-			-	Usulan sub kegiatan baru	25orang	-
		Jumlah halte yang dibangun	BOYOLALI	2 unit	209,000,000			209,000,000		2 unit	209,000,000
		Jumlah peserta yang mengikuti lomba pemilihan sopir/juru mudi /awak kendaraan umum teladan di tingkat Kabupaten	BOYOLALI	25 orang	9,000,000			9,000,000		25 orang	9,000,000
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah kendaraan**	**BOYOLALI**	**6 Unit**	**1,553,078,000**			**1,553,078,000**		**6 Unit**	**1,553,078,000**

		angkutan umum yang diuji									
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana penunjang pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	BOYOLALI	10 paket	1,460,078,000			1,460,078,000		10 paket	1,460,078,000
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara/ direhabilitasi/ dikalibrasi	BOYOLALI	10unit	93,000,000			93,000,000		10unit	93,000,000
TOTAL					**35,750,509,000**			**35,750,509,000**			**35,750,509,000**

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOYOLALI

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-4) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD Berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

7. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
8. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
9. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
10. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
11. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
12. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Kabupaten Boyolali Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada

dibawah ini beserta penjelasan terhadap pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini:

F. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing indikator yang telah ditetapkan

G. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 maupun perkiraan capaian tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

6. Besarnya keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Boyolali tidak diiringi dengan peningkatan pembiayaan, sehingga pencapaian pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali perlu dilakukan bertahap dengan pembagian yang proporsional diantara SKPD;
7. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami beberapa hambatan/kendala;
8. Sebagian besar usulan program/kegiatan yang diinventarisasi tidak sesuai dengan Rencana program/kegiatan yang telah dicanangkan pada RENJA maupun RENSTRA SKPD;
9. Perencanaan program/kegiatan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali masih berorientasi terhadap output bukan outcome, sehingga pelaksanaan evaluasi tidak optimal. Hal ini berdampak pada keterlambatan akan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan secara keseluruhan;
10. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali tidak didukung dengan sistem kerja stakeholder pendukung, sehingga

tidak sedikit pekerjaan yang dapat diselesaikan melebihi target waktu yang ditentukan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026, maka pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

5. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia bagi pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dengan arah kebijakan :
   - Pendidikan formal. Informal dan pelatihan bidang perhubungan
6. Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme perencana serta pelaksanaan pembangunan dengan arah kebijakan :
   - Pelibatan stakeholder dalam proses perencana dan kebijakan politik;
   - Melakukan sistem jaring asmara melalui temu karya pembangunan di Kelurahan, Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa tengah, Musrenbang Tingkat Nasional dan Pusat;
   - Meningkatkan peran dokumen RENJA SKPD dalam perumusan pembiayaan pembangunan
7. Meningkatkan konsultasi dan konfirmasi program pembangunan secara terpadu, dengan arah kebijakan
8. Menciptakan sistim jaringan perencanaan kota yang sistimatis, dengan arah kebijakan
   - Menciptakan sistem jaringan perencanaan yang terintegrasi antar SKPD dalam upaya *controling* terhadap kinerja SKPD yang dikaitkan dengan program prioritas RPJMD dan RKPD
9. Menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam sistim perencanaan dan pengkajian potensi ekonomi, dengan arah kebijakan:
   - Melibatkan pihak swasta serta akademisi untuk menjamin tercapainya objektifitas dan netralitas dalam penilaian pelaksanaan pembangunan

2.3 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

3.Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali merupakan unsur teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

4.Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali sesuai Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018, terdiri dari:

3. Kepala.
4. Sekretariat terdiri dari :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
   a. Seksi Lalu Lintas;
   b. Seksi Angkutan
4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari :
   a. Seksi Keselamatan
   b. Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan Pelanggaran
5. Bidang Pengujian dan Rekayasa Kendaraan terdiri dari:
   a. Seksi Pengujian Kendaraan
   b.Seksi Rekayasa Kendaraan dan Perbengkelan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan:

1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik;
2. Tersedianya pelaporan capaian kerja dan realisasi kinerja dinas;
3. Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
4. Terpenuhinya rehabilitasi sarana pengujian dan terminal;
5. Terwujudnya penertiban kendaraan dan kenyamanan pengguna jalan;
6. Tersedianya rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan pagar pengaman jalan;
7. Tersedianya buku uji, plat uji dan stiker tanda samping kendaraan bermotor;
8. Terpenuhinya dan Terpeliharanya pembangunan penerangan jalan umum;
9. Terpenuhinya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
10. Terpenuhinya penyusunan dokumen renja

Boyolali, 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOYOLALI

Ir. CIPTO BUDOYO,MM.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650303 199203 1 015